

18 Perusahaan Tertarik Kelola Dam Tembesi

SAGULUNG - Badan Pengusahaan (BP) Batam mulai mempromosikan proyek pengelolaan Dam Tembesi April ini. Data terakhir, tercatat ada sekitar 18 perusahaan yang menyatakan tertarik untuk ikut proses tender.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Lainnya BP Batam Eko Budi Seopriyanto mengatakan, proses tender akan dibuka secara terbuka, sehingga semua perusahaan mempunyai peluang sama. Termasuk PT Adhya Tirta Batam (ATB) yang saat ini mengelola waduk dan air bersih di Batam. "Sudah ada 18 perusahaan besar yang akan ikut.

Nama-namanya nanti saat market sounding dimulai," ujarnya, Kamis (5/4).

Dalam proses lelang kali ini, pemenang tender akan menangani enam kegiatan dari proses hulu produksi air baku di Dam Tembesi. Yakni dari waduk ke transmisi, lalu dari transmisi ke Water Treatment Plant (WTP), dari WTP ke reservoir, dari reservoir ke titik distribusi. Termasuk juga pemeliharaan pipa dan pemeliharaan waduk.

Sedangkan proses hilirnya di mana air baku akan dikelola menjadi air bersih menjadi hak dari ATB yang masih terikat konsesi pengelolaan air hingga

tahun 2020. Setelah konsesi selesai, maka akan menjadi tanggungjawab dari pemenang tender untuk pengelolaan air di Batam selanjutnya.

Eko mengungkapkan, ada dua hal penting yang harus menjadi perhatian para perusahaan yang akan ikut dalam proses tender. Di antaranya adalah harus perusahaan lokal, kalau pun ada perusahaan asing yang mau ikut harus menjalin kerja sama dengan perusahaan lokal. Kemudian juga harus memiliki modal yang cukup, serta pengalaman di bidang pengelolaan air. "Perusahaan asing silahkan ikut, tapi harus bekerja sama

dengan perusahaan lokal dan sahamnya juga harus dimiliki banyak lokal," kata Eko.

Dam Tembesi merupakan dam keenam yang dibangun oleh BP Batam dengan cara membendung laut, sehingga butuh proses menghilangkan kadar garam dalam air untuk mendapatkan air yang dapat dikonsumsi (desalinasi). Sebelum Dam Tembesi, BP Batam sudah membangun lima dam lain, yaitu Dam Seiharapan, Dam Seiladi, Dam Nongsa, Dam Mukakuning dan Dam Duriangkang yang sudah beroperasi.

Kapasitas Dam Tembesi

diperkirakan akan mencapai 600 liter per detik akan dialirkan dengan jaringan pipa air bersih yang telah dibangun sebelumnya. Dengan beroperasinya Dam Tembesi, nantinya seluruh dam di Batam akan mampu memproduksi sekitar 3.435 liter air bersih per detik untuk menyuplai kebutuhan masyarakat.

"Untuk menarik investasi kami terus membangun infrastruktur, termasuk sarana air bersih selain infrastruktur lain seperti pengembangan jalan, bandara dan pelabuhan," jelasnya.

● ahmad rohmadi

Pengawasan Pekerja Asing Belum Maksimal

SEIBEDUK - DPRD Batam mendukung langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengeluarkan peraturan mempermudah perizinan bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) yang akan bekerja di Indonesia. Tapi pengawasan di daerah masih lemah, sehingga program pemerintah pusat tidak berjalan dan merugikan pekerja lokal.

"Sebenarnya semangat dari regulasi ini adalah memberikan kemudahan izin bagi TKA yang bekerja untuk mengisi kompetensi yang tak dimiliki pekerja Indonesia," kata anggota Komisi IV DPRD Batam, Aman, Kamis (5/4).

Selain itu, pekerja lokal juga harus dituntut untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki agar bisa bersaing dengan pekerja asing. Menurut dia, kebijakan nasional ini tidak diawasi secara maksimal di daerah. Salah satunya di kawasan industri Mukakuning yang masih banyak mempekerjakan TKA dibandingkan pekerja lokal.

"Seharusnya jika tenaga ahli lokal tidak ada, mereka boleh saja merekrut TKA. Tapi hanya untuk pendamping dan transfer ilmu. Dan sekarang tidak pernah dilakukan," kata politisi PKB ini.

Disinggung soal jumlah TKA

di Batam, Aman mengaku tidak mengetahuinya. Dia mengatakan, data TKA berada di komisi II. "Ada di komisi II karena berurusan dengan pendapatan TKA dari IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Asing)," katanya.

Anggota Komisi II DPRD Kota Batam Hendra Asman mengatakan, pendapatan daerah dari IMTA sekitar Rp100 miliar. Dana itu digunakan untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan dan sertifikasi pekerja lokal. "Kalau angka persisnya saya kurang tahu. Sementara jumlah TKA kalau enggak salah 4.000 ke atas," ujarnya.

Dewan sangat mendukung langkah pemerintah dalam memangkas perizinan TKA di Indonesia. Regulasi ini menekankan tentang kemudahan mekanisme perizinan. Pemerintah pusat juga harus memperhatikan dan mengutamakan prinsip tenaga kerja lokal.

"Kalau bicara Batam memang tidak bisa dipungkiri tenaga ahli asing masih dibutuhkan karena Batam begitu banyak investor dari asing. Namun ini juga tidak boleh jadi dasar bahwa tenaga lokal tidak diperhatikan," ujarnya.

● iwan sahputra

HARUS SIAP DITUGASKAN DI HINTERLAND

Pegawai Tak Boleh Menolak Tugas

BATAM KOTA - Anggota Komisi I DPRD Kota Batam Muhammad Musofa mengatakan, Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko Batam harus siap ditugaskan di mana saja, termasuk ditempatkan di hinterland. Hal ini untuk memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat di pulau-pulau.

"Kalau namanya pegawai tak boleh menolak bertugas. Karena dalam prajabatan sudah bersumpah bersedia di tempatkan di mana saja," ujarnya di Kantor

DPRD Batam, Kamis (5/4).

Wali Kota Batam, sambungnya, harus tegas memberikan teguran sampai sanksi bagi pegawai yang enggan ditempatkan di hinterland. Sanksi yang diberikan seperti tidak mendapatkan jabatan atau nonjob dan sebagainya. "Kalau sudah nonjob, mereka akan sangat sulit mendapatkan kenaikan pangkat atau golongan dan akan berdampak terhadap karir sebagai pegawai," katanya.

Menurut dia, para PNS ju-

ga menentang kebijakan kepala daerah. Sehingga PNS tersebut bisa dikategorikan membantah perintah atasan dan tidak menghormati atasan. Oleh karena itu, Musofa mengimbau agar para PNS dapat mematuhi sumpahnya saat pertama kali diangkat menjadi PNS. "Memang banyak alasan. Salah satunya jauh dari keluarga dan lainnya. Tapi pelayanan kepada masyarakat yang harus lebih diutamakan dari pada yang lain," jelas politisi Hanura ini.

Musofa menambahkan, sejak

mendapatkan Surat Keputusan (SK) mutasi, pegawai seharusnya langsung mematuhi SK mutasi tersebut. Kemudian setelah mulai bekerja, ternyata tidak mampu melaksanakan tugas, atau tidak cocok lantaran bukan bidang keahliannya ataupun karena alasan lain, maka PNS dapat mengajukan surat pindah tugas ke pimpinan. "Di Kecamatan Belakangpadang, juga masih banyak lurah dari Batam yang tidak datang dengan alasan ada rapat di Kantor Wali Kota. Padahal kan setiap

pertemuan hanya dihadiri Camat. Sedangkan lurah berkumpul di Kantor Camat," katanya.

Sebelumnya, Pemko Batam kesulitan memindahkan pegawai untuk ditempatkan di hinterland. Pegawai lebih memilih menjadi staf biasa di mainland, dari pada mendapatkan jabatan namun bertugas di pulau. Saat ini ada sekitar 46 jabatan posisi eselon IV yang kosong di kantor kelurahan dan kecamatan di kawasan hinterland.

● iwan sahputra

Persaingan Kerja ...

reka berharap mendapatkan informasi terkait lowongan

tus asa. Sebab setiap hari selalu membaca info lowongan kerja di koran, di internet



KERJA SAMA GARUDA INDONESIA-KKP

Kont

JAKARTA - Pemer kontrak gross split u